

**DISKURSUS KORUPTOR DALAM MEDIA MASSA:
(Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Karakter
Koruptor Kader Partai Di Kompas Online
'kompas.com')**

Oleh:

Ahmad Toni dan Rocky Prasetyo Jati
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Budi Luhur

Email : tonianthonovubl@gmail.com
rocky.pj@gmail.com

ABSTRACT

This study of the discourse in the news framing perspective character kompas.com corrupt party cadres in the online media in Asia, aims to do construction and mapping of a number of news character corrupt major parties. Well, the character of the ruling party cadres that currently, many Democratic party cadres entangled in corruption cases, the pro-government party cadres PKB, PKS and PAN, to party cadres themselves as the party of opposition voiced SBY administration, the PDI-P.

Keywords: *Discourse, Character, Party cadres, Kompas.com*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Karakter politik dan ekonomi tersebut tidak bisa dipisahkan karena realitas manajemen media yang identik dengan ketidakpastian yang bisa disebabkan beberapa hal, antara lain perubahan regulasi, depresi ekonomi dan sistem permodalan, perkembangan teknologi, peningkatan tuntutan dan kesadaran publik, keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas, serta pergeseran minat konsumen media. Tentu manajemen media harus mampu mengantisipasi dan mengatasi semua faktor ketidakpastian tersebut. Pada akhirnya media berkembang

menjadi industri dengan salah satu ciri utama operasi bisnis yang meliputi “*dual product marketplace*”

Industri media memproduksi konten untuk dijual kepada khalayak, dan ‘menjual’ khalayak kepada pengiklan. Berdasarkan karakteristik tersebut, di dalam industri media terdapat “*content-market*” dan “*audience-market*”. Dimana produk media terutama konten seperti disampaikan seperti asumsi umum para ekonom yang dapat dengan mudah distandarisasi. Setiap produk media jelas menuntut kreatifitas dan keahlian spesifik. Namun pada saat bersamaan harus memenuhi selera konsumen yang

bervariasi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kreativitas produk media diperlukan untuk memberikan suatu pengalaman pada khalayak. Produk media juga dicirikan oleh tuntutan yang tinggi terhadap originalitas gagasan, sehingga menyebabkan isu tentang kekayaan dan hak intelektual sangat sensitif. Di samping itu, produk media juga merupakan *creative services* yang memfasilitasi kepentingan industri.

Kreativitas konten media online yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi, politik, sosial, bahkan ideologi adalah sajian konten yang berkaitan dengan kepemimpinan bangsa. Sajian ini sering muncul hadir di ruang publik dalam momentum peringatan momentum sejarah bangsa atau momentum pemilihan kepala negara hingga kepala daerah. Berkaitan dengan hal itu, isi media tentang diskursus koruptor yang berasal dari partai demokrat, mempengaruhi content pemberitaan Kompas.com.

B. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sad Tanti guna menyelesaikan studi pascasarjana di universitas Mercubuana mengenai framing terhadap pemberitaan kepemimpinan nasional di Harian Umum Kompas menempatkan segenap tokoh bangsa yang mempunyai visi dan misi membangun karakter bangsa lewat berbagai macam ide dan gagasan yang menyangkut pendidikan, ekonomi, social, budaya dan sebagainya.

Sementara penelitian tentang korupsi dilakukan di oleh Aulia dari Universitas Brawijaya yang memetakan bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh para pejabat Negara

menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang harus disanksi dengan pidana pemberatan dalam vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor, yang diberikan kepada legislative, yudikatif dan eksekutif.

C. Kerangka Teoritis Kekuasaan, Media, Korupsi Dan Moralitas

Kekuasaan global ialah isu kunci dikreasikan pada level yang menempatkan sebagian kekuasaan berada di luar batas dan kontrol pemerintah. McQual (Burton, 2008: 68) mengemukakan bahwa terdapat tiga hal tentang kekuasaan media, antara lain:

1. Keefektifan media sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan yang ada.
2. Pertanyaan tentang kepentingan kekuasaan siapa yang diterapkan (kepentingan kekuasaan kelas sosial, masyarakat, atau individu-individu)
3. Apakah media menambah, mempertahankan, atau mengurangi ketidaksetaraan kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Dalam batas yang luas, media memandang kekuasaan berimbas pada efek melalui tindakan institusional media, penghilangan atas sejumlah kepentingan dan memunculkan kepentingan yang lain. Efektifitas media dalam pandangan konstruktivis ialah sebuah agenda besar, setting media dan kekuasaan ekonomi politik yang melingkupinya. Media berpengaruh besar terhadap sistem sosial melalui produk-produknya yang termanifestasikan dalam bentuk konstruksi isi atau content media, ide yang dimuat dalam produk-produk media memposisikan diri pada dunia realitas.

Konstruksi isi media yang memuat sejumlah masalah korupsi memosisikan media pada level keberpihakannya terhadap kondisi sosial tertentu dari sistem sosial politik yang sedang berjalan. Ada pengharapan media yang mewakili sistem sosialnya dengan sebuah perubahan yang diagendakan oleh masyarakat, bentuk yang demikian merupakan representasi terhadap kebutuhan media sebagai indikator moralitas pada kondisi yang melatarbelakanginya. Definisi korupsi dalam perspektif hukum (Widoyoko, 2002: 10) adalah “penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian negara karena mengalihkan sumberdaya public untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. selanjutnya Widoyoko (2002: 11) “Dengan demikian, yang bisa melakukan korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan, terutama kekuasaan di sektor publik yang berwenang mengalokasikan dan mendistribusikan sumberdaya public”.

Lickona (Alfikalia, 2012: 78) menyatakan bahwa “pembentukan karakter generasi muda pada dasarnya dibagi bersama oleh tiga institusi: yaitu rumah (keluarga), agama dan sekolah”. Selanjutnya Lickona menjelaskan “pendidikan karakter sebagai usaha yang disengaja untuk mengembangkan kebaikan (*virtue*) yang merupakan kualitas manusia yang secara obyektif baik, bagi individu sendiri dan bagi masyarakat. Kebaikan diajarkan oleh hampir seluruh tradisi filsafat, agama dan budaya”.

Teori Konstruksi Realitas

Representasi ruang publik yang paling jelas sebagai wahana bagi diskusi publik adalah media massa. Oleh karena itu, media massa, tidak hanya terbatas

sebagai sarana untuk meraup keuntungan ekonomis, melainkan dalam fungsi editorialnya ia menjadi medium bagi ruang publik. Media massa, dengan demikian, bisa berperan dalam memperjuangkan terciptanya ruang kebebasan untuk menyatakan dan menampung opini publik (*public opinion*) atau untuk membentuk wacana publik (*public discourse*) (Ibrahim, 2004 :5). Perbedaan tersebut dinyatakan oleh James P. Gee (Eriyanto, 2005 : 26). Gee membedakan *discourse* dalam dua jenis yaitu (1) “discourse” (d- kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya (“on site”) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. (2) “Discourse” (D besar) yang merangkaikan unsur linguistik pada “discourse” (dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (*non-language “stuff”*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk *non-language “stuff”* ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Komponen *non-language “stuff”* itu juga yang membedakan cara beraksi, berinteraksi, berperasaan, kepercayaan, penilaian satu komunikator dari komunikator lainnya dalam mengenali atau mengakui diri sendiri dan orang lain.

Pendapat senada juga disampaikan oleh William L. Rivers dan kawan-kawan (Eriyanto, 2003:307) bahwa secara umum, berdasarkan kesimpulan dari berbagai studi, orang berpendidikan tinggi lebih menyukai media cetak atau media bacaan dibandingkan dengan media siaran; sedangkan mereka yang berpendidikan menengah lebih menyukai televisi dan radio. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif

wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Di sini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto, 2002:19).

Konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistemologi merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun dari proses kognitif dengan interaksinya dengan dunia objek material. Pengalaman manusia terdiri dari interpretasi bermakna terhadap kenyataan dan bukan reproduksi kenyataan. Dengan demikian dunia muncul dalam pengalaman manusia secara terorganisasi dan bermakna. Keberagaman pola konseptual (kognitif) merupakan hasil dari lingkungan historis, kultural, dan personal yang digali secara terus-menerus. Bagi kaum konstruktivis, semesta adalah suatu konstruksi, artinya bahwa semesta bukan dimengerti sebagai semesta yang otonom, akan tetapi dikonstruksi secara sosial, dan karenanya plural. Konstruktivisme menolak pengertian ilmu sebagai yang “terberi” dari objek pada subjek yang mengetahui. Unsur subjek dan objek sama-sama berperan dalam mengonstruksi ilmu pengetahuan. Konstruksi membuat cakrawala baru dengan mengakui adanya hubungan antara pikiran yang membentuk ilmu pengetahuan dengan objek atau eksistensi manusia. Dengan demikian paradigm konstruktivis mencoba menjembatani dualism objektivisme-subjektivisme dengan mengafirmasi peran subjek dan objek dalam konstruksi ilmu pengetahuan (Ardianto&Qness, 2002: 151-152).

Diskursus, Ideologi, dan Produksi Media

Terjemahan bebas kutipan itu bahwa kandungan media adalah komoditas yang dijual di pasar, penyebaran informasi dikendalikan oleh apa yang pasar akan tanggung. Sistem ini membawa implikasi mekanisme pasar yang tidak ambil resiko, yang membuat program dan media tertentu mendominasi wacana publik sementara ada pula yang terpinggirkan. Peter Golding dan Graham Murdock (Eriyanto, 2000: 70) berpendapat bahwa media massa adalah produsen budaya, yang lebih berperan sebagai mesin bisnis pencari keuntungan. Ideologi kapitalisme telah meresap dalam institusi media, termasuk hubungan antara pemilik dengan para pekerjanya. Isi media lebih diarahkan untuk melayani kepentingan atau kebutuhan orang alias pasar.

Ideologi adalah praktik atau gagasan yang menyiratkan adanya penopengan, penyimpangan, atau penyembunyian realitas tertentu, di sini ideologi merupakan khas perspektif teori kritis, juga ketika perspektif ini digunakan untuk menganalisis wacana (Eriyanto 2001:50-51 dalam Ardianto 2007:176-177). Raymond William (dalam Eriyanto, 2001: 87-88) mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut dalam tiga ranah yaitu (1) sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu; (2) sistem kepercayaan yang dibuat –ide palsu atau kesadaran palsu- yang biasa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah Ideologi dalam pengertian ini adalah seperangkat kategori yang dibuat dan kesadaran palsu dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain; (3) proses umum produksi makna dan ide.

Teori Framing (Entman) Dan Pemberitaan Koruptor di Media

Dalam artian Teori framing berbicara tentang seleksi isu yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wacana. Menurut framing, dalam wacana berlangsung proses pemilihan fakta mana yang mau diangkat, fakta mana yang mau disembunyikan, atau fakta mana dihilangkan sama sekali. Wacana menurut framing terdiri dari sejumlah komponen yang diisi dengan fakta-fakta pilihan itu.

Entman (1993a) menyebut framing sebagai:

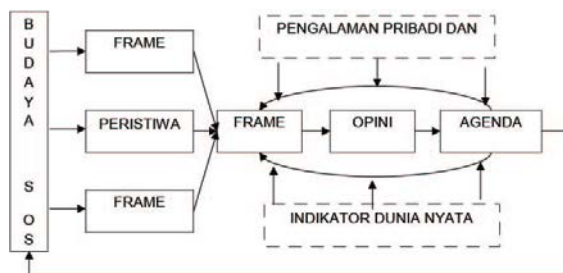
as a fractured paradigm, but like the communication field itself its interdisciplinary nature makes it attractive. When viewed as the interplay of media practices, culture, audiences, and producers, the framing approach guards against unduly compartmentalizing components of communication (sender, content, audience). As with any theoretical formulation, we must consider what aspects of the social world are better explained with its and which are obscured Framing is concerned with the way interests, communicators, sources, and culture combine to yield coherent ways of understanding the world, which are developed using all of the available verbal and visual symbolic resources. Before proceeding further, it will be helpful to propose my own working definition of framing, one that suggests a series of research questions out of its components.(Reese:2001:8).

Media memiliki peran aktif dalam menentukan isu sosial di tengah masyarakat untuk diangkat dalam meja redaksi kemudian menjadi produk jurnalistik surat kabar. Produk baca berupa informasi inilah yang berpotensi menjadi opini publik di tengah masyarakat, akan menjadi topik perbincangan hangat pada struktur masyarakat. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (Eriyanto, 2001:183), memandang bahwa telah terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam isi media. Terjemahan bebas sebagai berikut, pertarungan itu disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Latar belakang awak media (wartawan, editor, kamerawan, dan lainnya).
2. Rutinitas media (*media routine*), yaitu mekanisme dan proses penentuan berita. Misalnya, berita hasil investigasi langsung akan berbeda dengan berita yang di beli dari kantor berita.
3. Struktur organisasi, bahwa media adalah kumpulan berbagai *job-descriptions*. Misalnya bagian marketing dapat memengaruhi agar diproduksi isi media yang dapat di jual ke pasar.
4. Kekuatan ekstramedia, yaitu lingkungan di luar media (sosial, budaya, politik, hukum, kebutuhan khalayak, agama, dan lain-lainnya). Termasuk didalamnya sumber berita, pengiklan, pemerintah dan lingkungan bisnis
5. Ideologi (misalnya ideologi negara), yaitu kerangka berpikir atau referensi tertentu.

Pippa Norris dkk. menawarkan model untuk menjelaskan bagaimana seperangkat asumsi budaya seperti sistem

nilai dan norma dalam masyarakat sangat berpengaruh bagi media, dengan perannya dalam menentukan bagaimana media melakukan *framing* pemberitaan. Model ini digunakan Norris dalam melihat bagaimana media melakukan *news framing* terhadap isu terorisme : (Eriyanto, 2003: 12)



Sumber: Pippa Norris dalam Dibyantari, 2003: 12

Bagan 1 Model Proses Framing

D. Hasil Analisis

Konstruks Umum Berita Kader Partai (Demokrat, PAN, PDIP, PKS, PKB dan Golkar)

Berikut adalah konstruks secara umum dari para kader partai yang diberitakan oleh kompas.com dalam kerangka framing Entman berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan diatas. Adapun tolak ukur nilai-nilai yang diwarisi tradisi berbagai macam pemikiran dan konsepsi berbangsa dan bernegara. Artinya situasi Indonesia saat ini dengan maraknya korupsi yang dilakukan oleh kader partai memerlukan langkah-langkah konkret serta penegakan hukum yang sesuai dengan semangat Indonesia terbebas dari praktik-praktik korupsi, adalah:

Matrik 1

Konstruksi Berita Dalam Framing Entman 1

Framing	Uraian
---------	--------

Entman	
<p><i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<p>Berikut adalah uraian konstruks terhadap nilai apa yang terkandung di dalam pemberitaan kader partai demokrat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Angie tidak jujur, malakukan pencucian uang Nazarudin terlibat 32 kasus korupsi Andi Malarangeng mengundurkan diri Hartanti Murdaya tidak korporatif dan berbohong.
<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Konstruks terhadap siapa actor dibalik permasalahan yang melibatkan kader partai Demokrat dengan segala keterkaitannya dengan pihak-pihak lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam kasus Angie terdapat mekanisme hubungan yang rumit diantara para kader partai demokrat. hubungan tindak pidana korupsi dilakukan bukan hanya perseorangan tetapi sudah dilakukan secara korporasi (bersama-sama). angie merupakan manta puteri indonesia yang merepresentasikan perempuan indonesia secara utuh. angie adalah

	<p>pejabat dipartai demokrat sehingga ia lebih leluasa untuk melakukan loby dan sejumlah pendekatan persuasive dengan kader-kader partai demokrat maupun kader dari partai lain. kedekatannya dengan kekuasaan partai dan kedudukannya yang strategis di parlemen, angie melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri, kelompok atau golongan serta lembaga partai politiknya.</p> <p>b. Muhammad Nazarudin yang berkedudukan di partai sebagai bendahara umum memaksa kader partai demakorat ini melakukan segala tindak kejahatan korupsi dengan puluhan kasus yang menjeratnya. kekuasaan yang dekat dan kedudukan yang menyertainya sebagai kader partai demokrat memberikan jalan,</p>		<p>serta kemudahan untuk memperkaya diri, keluarga serta koleganya. praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh kader ini memberikan jalan dan ruang untuk pembertantasan korupsi. dikarenakan praktik korupsi yang dilakukan oleh Nazarudin mampu menyeret sejumlah kader partainya untuk ikut serta dalam proses peradilan negeri ini. Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menempatkan karakter kader partai Demokrat pada level yang kritis dalam hal moralitas dan ketidak konsistenan serta usaha kabur ke luar negeri untuk menghindari masalah dan proses hukum.</p> <p>c. Ruang pembelaan Andi Malarangeng masih terbuka dengan ststusnya yang menjadi tersangka dalam tindak pemberantasan</p>
--	--	--	--

	<p>korupsi. Dengan percaya diri kader partai Demokrat ini mengundurkan diri dari ruang kekuasaan. Dengan demikian Andi menjadi satu-satunya kader partai, baik partai demokrat maupun partai lain yang dengan lapang dada mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>Konsekuensi logis dalam mengambil keputusan ini memang memberikan segi positif bagi citra partai Demokrat.</p> <p>d. Konstruks atas kebohongan hartanti dan sikap tidak korporatifnya dalam pemberantasan korupsi menjadi identitas kader partai yang dekat dengan kekuasaan. Kekuasaan dimana ia mampu mepengaruhui, memaksa kepala daerah dalam proses kebijakannya. Bahkan sikap kader partai ini justeru</p>		<p>mencerminkan bahwa kekuasaan dan pengelolaan bernegara ialah dengan sistem kolegiat.</p> <p>Penilaian atas penyebab masalah dalam kontruks pemberitaan kader partai Demokrat adalah:</p> <p>a. Angie dalam konstruks media dianggap tidak mempunyai itikad dan integritas untuk mendukung pemberantasan korupsi. Angie terlalu mendramatisir keadaan hukum yang menjeratnya, ia mengedepankan keluhan yang berisi seakan-akan ia bersih dari segala tindak pidana korupsi. Dikarenakan terdapat tekanan politis yang menjadikan Angie tetap mempertahankan kebohongannya di depan persidangan.</p> <p>b. Muhammad Nazarudin dikonstruks oleh media sebagai orang yang tidak mempunyai itikad dan kemampuan</p>
		<p><i>Make Moral judgement (membuat keputusan moral)</i></p>	

	<p>serta integritas yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Bahkan kader partai demokrat ini adalah kader yang tidak menjunjung tinggi aturan dan moralitas ia sebagai warga negara dan sebagai orang yang beragama.</p> <p>c. Andi Malarangeng dikonstruks oleh media sebagai kader partai yang kesatria. Ia lapang dada dengan ststusnya sebagai tersangka dalam kasus Hambalang namun ia dengan berani untuk mengundurkan diri dari kekuasaan yang dimilikinya.</p> <p>d. Hartanti adalah kader partai yang dengan kekuasaan, dan kedekatan dengan kekuasaan ia menjadikan korupsi, suap menyuap ialah hal yang lazim dilakukan.</p>
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	<p>Penanggulangan permasalahan yang terkonstruks dalam pemberitaan kader partai Demokrat ialah:</p> <p>a. Angie, harus</p>

n)	<p>menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dihimbau untuk membuka kasus dan pelaku korupsi yang melibatkan dirinya.</p> <p>b. Nazarudin harus menghormati segala keputusan dan vonis serta pertanggung jawabannya pada kasus-kasus lain. Ia juga dihimbau untuk terus membongkar keterlibatan kader dari partai lain dalam kasus korupsi yang menjeratnya.</p> <p>c. Andi Malarangeng dihimbau untuk jujur dan menaati segala proses hukum yang menjeratnya.</p> <p>d. Hartati diharapkan bisa mengungkapkan semua kegiatannya dalam bertransaksi politik untuk penyusunan yang dilakukannya dengan berpegang pada aturan dan hukum yang berlaku.</p>
----	---

Matrik 2

Konstruksi Berita Dalam Framing Etman 2

Framing Entman	Uraian
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian)	Konstruksi nilai yang terkandung dalam pemberitaan kader partai pendukung pemerintah

Masalah)	<p>ialah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wa Ode Nurhayati kader partai Islam (PAN) korupsi atau tidak bersih. b. Anis Matta dan Misbakhun kader partai Islam (PKS) korupsi atau tidak bersih. c. Muhaimain iskandar kader partai Islam (PKB) korupsi atau tidak bersih. 		<ul style="list-style-type: none"> b. Anis Matta dan Misbakhun dengan kekuasaan yang dipegang di partai maupun parlemen DPR-RI. Kedua orang penting dan kader partai Islam (PKS) dihadapkan pada persoalan korupsi. Bahkan PKS yang begitu menggebu-gebu menyuarakan diri sebagai partai bersih akhirnya menempatkan beberapa kadernya dalam pusaran kasus korupsi. c. PKB sebagai representasi dari kaum naahdiyyin sebagai organisasi massa terbesar menempatkan Muhaimin sebagai kader dari partai Islam yang terjerat kasus korupsi. Sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dekat dengan kekuasaan ia bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri.
<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Konstruks penyebab masalah yang termuat dalam bingkai pemberitaan kader partai pendukung pemerintah ialah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wa Ode Nurhayati menduduki posisi strategis dalam bidang penentuan anggaran untuk pembangunan daerah. Posisi yang demikian dimanfaatkan secara pribadi maupun kelompok untuk memperkaya dan menyalahgunakan wewenang. Artinya tidak meenjamin seseorang yang berkendaraan politik Islam pun kadernya melakukan tindak pidana korupsi. 	<p><i>Make Moral</i></p>	<p>Proses pembingkaiian atas penilaian penyebab</p>

<i>judgement</i> (membuat keputusan moral)	<p>masalah adalah terdapat dalam pemberitaan dengan penemuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partai agama (Islam-PAN) belum tentu bersih dari kepentingan-kepentingan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Partai agama (Islam-PKS) belum tentu bersih dari kepentingan-kepentingan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Partai agama (Islam-PKB) belum tentu bersih dari kepentingan-kepentingan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	<p>Penanggulangan masalah yang ditawarkan dalam konstruksi para kader partai pendukung pemerintah ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kader partai PAN, Wa Ode Nurhayati harus menghormati keputusan hukum yang berlaku. Kader partai PKS berusaha menjelaskan dan menggiring public pada konsiderasi persepsi

	<p>masyarakat sebagai partai yang bersih.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kader PKB tidak punya ketegasan dalam menghadapi kasus korupsi dan menaati tuntutan kasus korupsi yang menjeratnya
--	--

Matrik 3

Konstruksi Berita Dalam Framing Etman 3

Framing Entman	Uraian
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Konstruksi pemberitaan yang mengandung nilai ialah: Pembelaan partai terhadap para kadernya
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pembingkaian penyebab kader partai oposisi korupsi yang termuat dalam pemberitaan ialah: Pembelaan terhadap kader partai dikarenakan ada beberapa kader partai PDI-P yang disebut-sebut terlibat dalam kasus yang dilakukan oleh kader partai lain (Demokrat) sehingga diperlukan pembelaan terhadap kader partai oposisi ini sebagai partai yang bersih yang memberikan nilai positif terhadap para kadernya.
<i>Make Moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	PDI-P sebagai partai yang bersih termasuk juga moralitas atau karakter para kadernya.
<i>Treatment Recommend</i>	Pembuktian secara hukum keterlibatan dari

ation (menekankan penyelesaian)	kader partai PDI-P.
------------------------------------	---------------------

Matrik 4

Konstruksi Berita Dalam Framing Entman 4

Framing Entman	Uraian
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Konstruksi terhadap pemberitaan dan nilai yang terkandung di dalamnya ialah sebagai berikut: Kader Golkar napi (narapidana) korupsi
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Proses pembedaan siapa dan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah: Sejarah Golkar sebagai partai yang berkuasa selama negeri ini merdeka menjadikan Golkar pada penilaian negatif keberadaan partai di negeri ini. Hal inilah yang memunculkan sentiment negatif terhadap kader-kadernya yang telah banyak mewarnai dinamika perpolitikan dan kasus korupsi di negeri ini. Generasi

	tua di Golkar ialah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus korupsi
<i>Make Moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Pemberitaan terhadap kader partai Golkar dalam penilaian penyebab permasalahan korupsi terbingkai dalam: Pembelaan terhadap kader dan sejumlah organisasi dibawah Golkar sebagai kader dan organisasi yang bersih.
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Konstruksi terhadap penanganan masalah dalam pemberitaan ialah: Pembuktian secara hukum keterlibatan kader dan aliran uang negara.

Konstruksi Karakter Koruptor Kader Partai

Karakteristik dalam konsepsi framing Entman ialah termuat dalam pelaku konstruksi pemberitaan media, karena menyangkut siapa yang dianggap penyebab masalah yang kemudian melahirkan nilai positif atau nilai negatif yang dibawa oleh seseorang baik untuk landasan bertindak untuk dirinya sendiri maupun bertindak untuk orang lain dan atau bertindak untuk kepentingan bersama-sama. Landasan yang demikian menentukan sikap dan perilaku sebagai kepribadian, karakter diri seseorang dalam bersosial, berbangsa dan bernegara.

Wacana kader partai dalam konteks framing melahirkan segenap interpretasi yang beragam, mengingat dasar wacana ialah sesuatu yang berpijakan pada kekuatan ide, ide yang tertuang dan belum terjadi pembuktian realitas. Wacana dalam perspektif framing sebagaimana yang dinyatakan oleh Gamson (Eriyanto, 2006: 172) ialah “frame dapat dimaknai sebagai batasan-batasan wacana serta elemen-elemen konstitutif yang tersebar dalam konstruksi wacana”.

Istilah yang pragmatis tentang karakter yang dikemukakan oleh Alfikalia (2012: 78) “fokus pencegahan paling mendasar adalah membina individu-individu untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter-karakter pendukung anti korupsi”. Selanjutnya menurut Lickona (Alfikalia, 2012: 78) terdapat sepuluh element untuk mengembangkan pribadi yang kuat berkarakter, antara lain: kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, kontrol diri, cinta, sikap positif, kerja keras, integritas, rasa syukur dan rendah hati”.

Sebagaimana Angelina Sondakh yang dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi Puteri Indonesia yang mewakili kecerdasan, kecantikan perempuan Indonesia dengan bekal pendidikan tinggi tidak mampu mempertahankan diri dari pergaulan politiknya. Ada semacam pembiaran masa lalu seseorang yang dibuat begitu saja setelah memasuki ranah kehidupan berpolitik di negeri ini. Tentunya ada indikator mekanisme dan sistem perpolitikan yang keliru bahkan lebih dari sebuah kesalahan yang biasa. Adapun indikator tersebut ialah:

1. Pola rekrutmen partai menjadi ukuran dan titik tolak dan tolak ukur dalam proses pengkaderan wakil-

wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan nasib dan cita-cita bersama menuju negara yang makmur.

2. Sistem hukum dan aturan lembaga negara yang terlalu lemah, sehingga memungkinkan seseorang mengakali celah tersebut untuk menggunakan wewenangnya.
3. Pergaulan kader partai yang memungkinkan adalah deal-deal politik dalam sistem perpolitikan.
4. Kekuasaan dan wewenang legislatif yang terlalu besar sehingga memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
5. Sistem pendidikan yang memunculkan seseorang atau generasi yang tidak berkarakter kuat dan mempunyai integritas terhadap bangsa dan negaranya.
6. Lemahnya pengawasan lingkungan terutama peran orang tua dalam membentuk karakter anaknya.

Ada sejumlah hal penting dalam konstruks karakter partai yang terjerat kasus korupsi yang melibatkan kolega kepartaiannya serta pihak-pihak lain yang terlibat sebagai penyuap dengan kesalahan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Istilah rekanan wakil rakyat dalam proyek yang ditangani oleh mereka, adapun konstruks kader partai Demokrat tersebut adalah:

1. Kader partai demokrat tidak jujur (bohong) sejumlah pemberitaan yang mengkonstruks Angelina Sondakh, Muhammad Nazarudin, Hartati Murdaya dan Andi Malarangeng menunjukkan sikap yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada lembaga hukum atas sejumlah kasus yang menyimpannya. Dengan demikian

maka, ada generalisasi bahwa kader partai Demokrat secara umum memiliki sikap, karakter yang tidak jujur dalam hal kebenaran, inilah indikator mereka tidak mempunyai *virtue*.

2. Kader partai Demokrat memiliki karakter tidak korporatif, sikap inilah sebagai elemen penting seseorang yang tidak memiliki nilai luhur, yakni integritas. Makna integritas ialah ia mendedikasikan diri kepada kepentingan bangsa dan negara, diatas kepentingan lain yang menyertainya, baik kepentingan pribadi, golongan, partai dan sebagainya. Seseorang dikatakan sebagai seorang yang tidak konsisten dengan tindakan yang dilakukannya adalah individu yang tidak memiliki sikap positif. Individu yang memiliki sikap negatif terhadap kehidupan menjadi beban bagi dirinya sendiri dan orang lain.
3. Kader partai demokrat memiliki karakter tidak mampu mengontrol diri. Sikap kontrol diri merupakan kemampuan seseorang yang lahir dari dalam jiwa dan kepribadiannya, jika seseorang memiliki karakter yang kuat, maka ia tidak akan tergoda dengan persuasive yang datang dari luar. Ia mempunyai prinsip dalam hidupnya, kontrol diri akan mampu untuk mengendalikan amarah, mengatur selera atau syahwat indrawi, kesenangan, godaan, menunda pemuasan dari hal-hal yang merugikan orang lain.
4. Kader partai Demokrat tidak memiliki karakter dan sikap Bijak. Kebijaksanaan ialah bentuk kebaikan yang dimiliki oleh seseorang yang mengarahkannya kepada bentuk-

bentuk nilai kebaikan yang lain. Kebijaksanaan ialah pondasi setiap individu dalam menerapkan, mengimplementasikan, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan kapan harus bertindak, cara bertindak serta penyeimbangan antara kebaikan-kebaikan lainnya. Ada rasa simpati dan empati dalam diri seseorang yang memiliki sikap dan karakter bijak untuk tidak melakukan atau menyakiti orang lain.

5. Kader partai Demokrat tidak adil. Keadilan yang dimaksudkan ialah menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak kesejahteraan hidup rakyat. Kader partai yang seharusnya membawa perubahan dalam sistem sosial politik suatu bangsa justru menjadi momok bagi rakyat. Sikap keadilan yang dimiliki oleh seseorang akan hadir dalam karakter dirinya yang menghormati diri sendiri (*self-respect*) untuk tidak melakukan tindak merugikan siapapun, termasuk dalam tindak korupsi.
6. Kader partai Demokrat tidak memiliki sikap dan karakter integritas. Integritas ialah kemampuan seseorang dalam menaati hukum, aturan dan moral yang berlaku, setia terhadap hati nurani, melaksanakan janji. Dengan demikian seorang kader partai memiliki konsistensi diri untuk berpegang teguh terhadap aturan dan hukum yang berlaku dan tidak pernah bertentangan atau berlawanan dengan prinsip-prinsip berkeadilan. Seorang kader partai yang tidak memiliki integritas pada dirinya berarti kader partai tersebut tidak bermoral.

Selanjutnya konstruksi media terhadap karakter kader partai pendukung

pemerintah (SBY), yakni PAN, PKB, PKS dan Golkar mengenai kader-kader partai tersebut yang berhubungan dengan kasus korupsi. Berikut adalah dua elemen konstruks karakter kader partai penyokong pemerintah adalah:

- 1) Konstruks karakter kader partai PAN, PKS dan PKB serta Golkar ialah korup, adapun korup terwujud dalam sikap berikut ini:
 - a. Religius, yang menempatkan segala sesuatu pada pusaran keimanan dan ideologi agama dari partainya.
 - b. Tidak bijaksana, tidak mampu mengarahkan diri pada kebaikan dan tindakan atau perilakunya sebagai wakil rakyat.
 - c. Tidak adil, tidak mampu menghormati diri, sebagai penghargaan terhadap hak dan harga dirinya.
 - d. Tidak mampu mengontrol diri, tidak mampu mengontrol diri dari syahwat kesenangan termasuk kekuasaan yang dimilikinya.
 - e. Tidak memiliki cinta, tidak memiliki kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri untuk kepentingan rakyat.
 - f. Tidak memiliki sikap positif, sikap ini merupakan pilihan yang berkonsekuensi, artinya kader partai hanya menjadi beban rakyat bukan orang yang diharapkan mampu membawa dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
 - g. Tidak memiliki inetgritas, sama juga tidak bermoral karena kader partai tidak memiliki hati nurani, bertentangan dengan prinsip aturan, hukum yang berlaku.
- 2) Konstruks karakter kader partai PDI-P (Partai Oposisi)

- a. Sikap dan karakter sombong, dengan melakukan pembelaan diri terhadap para kadernya dengan alasan PDI-P adalah partai oposisi yang konsisten untuk tidak ikut serta dengan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah.
- b. Tidak memiliki inetgritas, sama juga tidak bermoral karena kader partai tidak memiliki hati nurani, bertentangan dengan prinsip aturan, hukum yang berlaku.
- c. Tidak memiliki sikap positif, sikap ini merupakan pilihan yang berkonsekuensi, artinya kader partai hanya menjadi beban rakyat bukan orang yang diharapkan mampu membawa dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
- d. Tidak memiliki cinta, tidak memiliki kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri untuk kepentingan rakyat.
- e. Tidak bijaksana, tidak mampu mengarahkan diri pada kebaikan dan tindakan atau perilakunya sebagai wakil rakyat.
- f. Tidak adil, tidak mampu menghormati diri, sebagai penghargaan terhadap hak dan harga dirinya.
- g. Tidak mampu mengontrol diri, tidak mampu mengontrol diri dari syahwat kesenangan termasuk kekuasaan yang dimilikinya.

Berikut adalah matriks konstruksi media kompas.com dalam pemberitaan karakter kader partai:

Matrik 5
Konstruksi Karakter Kader-Kader Partai

Konstruksi karakter	Konstruksi karakter	Konstruksi karakter
---------------------	---------------------	---------------------

kader partai Demokrat	kader partai pendukung pemerintah (PAN, PKB, PKS dan Golkar)	kader partai oposisi (PDI-P)
Tidak jujur	Religious	Sombong
Suka bohong	Tidak bijaksana	Tidak memiliki integritas
Tidak korporatif	Tidak adil	Tidak memiliki sikap positif
Tidak mampu kontrol diri	Tidak mampu kontrol diri	Tidak memiliki cinta/kasih
Tidak bijaksana	Tidak mempunyai cinta/kasih	Tidak bijaksana
Tidak adil	Tidak memiliki sikap positif	Tidak adil
Tidak memiliki integritas	Tidak memiliki integritas	Tidak mampu kontrol diri

E. Pembahasan

Rekonstruksi Wacana Karakter Koruptor Dalam Perspektif Komunikasi Politik

Macridis menyatakan bahwa (2012: 21) “partai politik sering dianggap sebagai faksi (kelompok-kelompok yang saling bertentangan dalam partai) dan tidak dapat dipercaya”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Redaksi Kompas.com Margianto “karier dalam berpolitik membutuhkan banyak sekali biaya dalam pelaksanaan pemilu atau pesta demokrasi. Sehingga para politisi lebih memilih jalur cepat dalam pembiayaan politik daripada sistem pendidikan politik yang sehat yang

diterapkan sebagai landasan berkampanye”.

Sementara dalam berkehidupan politik Lily Wahid menyatakan bahwa “bukan rahasia lagi mereka (kader partai) terlibat korupsi dikarenakan ada beban setiap kader partai yang duduk sebagai anggota dewan (DPR) akan melakukan segala cara untuk melakukan korupsi” Hal senada juga dinyatakan oleh Herdiansyah sebagai anggota gerakan anti korupsi “partai politik seharusnya awareness terhadap permasalahan korupsi dan bentuk-bentuk konsekuensinya. Partai dan kader partai harusnya sadar dengan segala tindakan yang merugikan orang banyak. Sistem yang demikian hendaknya dilakukan oleh partai politik dan ditanamkan kepada seluruh kadernya.

Proses rekrutmen dan karakter kader partai politik memberikan keleluasaan kepada kader untuk melakukan tindak yang merugikan rakyat, dikarenakan adanya mekanisme instanisasi rekrutmen, celah yang demikian dimanfaatkan oleh beberapa kader yang saling silih berganti berganti partai sebagai kendaraan politiknya menuju kekuasaan. Korupsi sebagai bahaya laten yang dibuka oleh sistem kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh lembaga tinggi negara (legislatif). Cara dan mekanisme partai politik yang membebaskan kadernya untuk memberikan dana storan sebagai wujud loyalitas terhadap partai mengarahkan mereka pada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Sistem perpolitikan seperti inilah yang memungkinkan setiap kader partai, apakah ia seorang yang religious, nasionalis, apakah ia bermoral atau tidak, tetapi dengan sistem yang demikian yang mengakibatkan tindakan kader partai

kepada jalan yang dikehendaki oleh partainya.

“Moral kekuasaan ialah sebagai akibat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, dimana moral kekuasaan sebagai jalan untuk melakukan berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan”. Artinya jika seseorang berada pada lingkungan moral kekuasaan maka secara individual, maupun secara kultural akan menggunakan kekuasaan sebagai alat atau instrument tindakan korupsi. Hal ini senada dengan konsep wacana dalam kerangka Gamson yang menawarkan konsep wacana kultural akan mempengaruhi konsep wacana individual.

Konsep wacana seseorang dikatakan sebagai koruptor dilahirkan sebagai akibat dari konsep wacana kultural yang membentuk dirinya pada karakter yang demikian. Pada prinsipnya setiap orang mempunyai kontrol diri, integritas, dan sikap positif untuk mengarahkan mereka pada tindakan yang positif. Namun sistem perpolitikan dan internal politik dalam suatu partai dan mekanisme-mekanisme komunikasi politik partai mempengaruhi, sikap dan tindakan seseorang pada wilayah tindakan yang merugikan orang lain. Selanjutnya Wahid menyatakan bahwa “Saya tidak pernah melihat bentuk-bentuk pencegahan partai politik terhadap kegiatan korupsi. Dengan demikian akan berimbas kepada kader partai, seperti yang saya coba, bertentangan dengan mekanisme partai dalam mengupayakan deal-deal politik untuk memenuhi keuangan partai. Kader yang menentang akan diberhentikan dan dianggap sebagai kendala dalam mengumpulkan dana bagi partai”.

Pembiaran terhadap pola kehidupan berpolitik kader partai yang mengarah

pada pembiaran dan kebebasan dalam melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan adalah bentuk ketidak mampuan partai politik dalam membina, mengkader dan mengarahkan kader kepada kehidupan berpolitik yang baik. Memang sulit tolak ukur berkehidupan politik yang baik, namun pendidikan politik kader partai harusnya diutamakan dengan mekanisme yang dibuat sebenar-benarnya. Sistem dan moralitas kader sebenarnya dibawa sejak ia berada pada lingkungan keluarga atau lingkungan yang membentuknya.

Rekonstruksi Wacana Karakter Koruptor Dalam Perspektif Gender dan Psikologi Komunikasi

Dalam perspektif gender, keterwakilan perempuan dalam parlemen dan apartur negara banyak pihak menilai sudah pada tahap proporsional, dan tahap profesional. Bahkan aturan dalam kepartaian pun keterwakilan perempuan dalam mekanisme, syarat dan sistem verifikasi partai menempatkan perempuan dalam posisi yang harus diperhatikan, dengan alasan-alasan yang menunjang tinggi perempuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Wahid “Angelina Sondakh, hanya bagian terkecil kader partai (Demokrat) yang ketahuan, hampir semua kader partai Demokrat akan bisa dijadikan tersangka kasus tersebut. Angelina Sondakh dengan gaya berpakaian, perhiasan dan sebagainya ialah gaya orang berduit (uang). Ia mendapatkan itu semua dari korupsi yang dilakukan”.

Hal senada juga dinyatakan oleh Margianto “Dalam kasus Angelina Sondakh, keterwakilan perempuan di parlemen memang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan hak-hak perempuan dalam parlemen”. Lebih jauh lagi “pendidikan

karakter dan moral yang diperoleh seorang wakil rakyat yang duduk di parlemen akan menjadi bekal hidup, sebagai filter terhadap tindakan individual orang tersebut (yang bersangkutan) untuk menjaga integritasnya. Integritas secara personalitas, keluarga, negara serta menggunakan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan". "Dalam pandangan developmentalisme menjadikan negara industri sebagai model proses politik, ekonomi, sosial, kultural. Menurut mereka demokrasi dan pembangunan akan berjalan saling mendukung" (Fahih, 2008: 118).

Proses demokratisasi menjadikan perempuan sebagai kelas yang perlu diperjuangkan dalam sistem pembangunan dewasa ini yang berorientasi pada sistem insudtri negara Dunia Ketiga. Proses yang demikian menempatkan perempuan pada level kaum yang berusaha untuk merubah paradigm dan perspektifnya sendiri. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan dalaam sistem demokrasi modern yang harus dimiliki oleh perempuan, diantaranya dalah:

- a. Moralitas, yang bersumber pada sistem nilai-nilai yang melingkupinya, baik agama, keluarga, lingkungan dan lain-lain.
- b. Integritas, sikap penuh tanggung jawab terhadap apapun tugas yang diemban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- c. Amanah, dimana sifat ini ialah menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk bisa dibawa dan diperjuangkan sesuai dengan aspirasi.

F. KESIMPULAN

Pada dasarnya media mencoba untuk konsisten terhadap ketidakberpihakan yang dimilikinya sebagai sebuah proses independensi media dengan berbagai macam kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak kader partai demokrat. Realitas yang terkonstruksi dalam wacana pemberitaan media kompas.com sebagai media online terbaik di Indonesia dan di Asia mampu dan terus konsisten dengan fungsi dan tujuan media sebagai pihak yang mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Kompas.com mampu memposisikan diri sebagai media yang mengusung nilai-nilai berbangsa dan bernegara dengan mengkedepankan sisi moralitas elemen bangsa dengan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Berikut adalah wacana dalam konsepsi framing Entman dalam pemberitaan karakter koruptor partai di kompas.com, dimana konstruksi ini meliputi kader-kader partai yang terjerat kasus korupsi, baik yang sudah divonis, tersangka maupun terduga, ialah sebagai berikut:

- a. Konstruksi Karakter Kader Partai "tidak jujur".
- b. Konstruksi Karakter Kader Partai "suka berbohong".
- c. Konstruksi karakter kader partai "tidak korporatif".
- d. Konstruksi karakter kader partai "tidak mampu mengontrol diri".
- e. Konstruksi karakter kader partai "tidak bijaksana".
- f. Konstruksi karakter kader partai "tidak adil".
- g. Konstruksi karakter kader partai "tidak memiliki cinta/kasih".

- h. Konstruksi karakter kader partai
“tidak memiliki integritas”.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikaila, 2011. *Moral dan Konsep Integritas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Burton, Graeme. 2008. *Media dan Budaya Populer*, Yogyakarta: Jalasutera.
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana Suatu Pengantar*. Yogyakarta. LkiS.
- _____.2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta:LKiS .
- Ibrahim, Idi Subandy. 2010. *Kritik Budaya Komunikasi*, Yogyakarta: Jalasutera.
- McQuail, Dennis. 2000. *Mass Communication Theory*, London: Sage Publication.
- _____. 1991. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- _____. 1987. *Mass Communication Theory: An Introduction*. Beverly Hill, California : Sage Publication.